

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN KEPALA
DESA DALAM MEMPERSATUKAN KEANEKARAGAMAN
SUKU DAN BUDAYA MENURUT UU No. 6 Tahun 2014
(Study di Desa Way Harong Kecamatan Waylima)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**RESTU IRAWAN
NPM. 1321020155**

Jurusan: Siyasah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN KEPALA
DESA DALAM MEMPERSATUKAN KEANEKARAGAMAN
SUKU DAN BUDAYA MENURUT UU No.6 Tahun 2014**
(Study di Desa Way Harong Kecamatan Waylima)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

RESTU IRAWAN

NPM. 1321020155

Jurusan: Siyasah

Pembimbing I :Drs.Susiadi AS.,M. Sos.I

Pembimbing II :Eti Karini, S.H., M.Hum

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H/2019 M

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN KEPALA DESA DALAM MEMPERSATUKAN KEANEKARAGAMAN SUKU DAN BUDAYA MENURUT UU No.6 Tahun 2014 (Study di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima) Oleh

RESTU IRAWAN

Kepala desa adalah orang yang mengepalai atau memimpin desa, dimana kepala desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Hal utama yang menunjang pembangunan nasional tersebut dilandasi dengan persatuan dan kesatuan tanpa memandang perbedaan suku, adat, dan budaya. Khususnya Di desa Way Harong terdapat beberapa suku diantaranya, Lampung, Jawa, dan Sunda. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti ingin meninjau peran kepala desa dalam mempersatukan keanekaragaman suku dan budaya menurut UU No. 6 tahun 2014 dan hukum Islam.

Permasalahan masalah dalam penelitian ini ialah permasalahan berkomunikasi sesama masyarakat yang berbeda suku, pendidikan yang rendah, tradisi kebiasaan masyarakat yang patuh aturan nenek moyang, serta masyarakat yang fanatik terhadap sukunya sehingga peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) apakah peran kepala desa dalam mempersatukan keanekaragaman suku dan budaya di desa Way Harong sudah sesuai UU no 6 tahun 2014, 2) pandangan hukum Islam terhadap peranan kepala desa dalam mempersatukan suku dan budaya di desa Way Harong. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran kepala desa dalam mempersatukan suku dan budaya di Desa Way Harong serta untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap peranan kepala desa dalam mempersatukan suku dan budaya di Desa Way Harong.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif dan Jenis penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan) sebagai jenis penelitiannya dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan meliputi, observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data yang digunakan yaitu, editing dan sistematis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, seluruh data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah, dikelompokkan masing-masing yaitu data yang mengenai hasil observasi, dan wawancara kepada sampel .

Berdasarkan hasil analisis dapat dikemukakan bahwa kepala desa di desa Way Harong sudah berperan sesuai dengan hukum Islam dan UU No. 6 tahun 2014. Namun, terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan peranan kepala desa tersebut. Diantaranya, perbedaan kebiasaan, perbedaan gaya bahasa, pendatang yang lebih giat dibandingkan masyarakat pribumi, wilayah desa yang cukup luas, serta kepentingan politik yang berbeda.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi sebagai mana metinya terhadap skripsi saudara :

Nama : Restu Irawan

NPM : 132102055

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Siyasah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Kepala Desa Dalam
Mempersatukan Keanekaragaman Suku Dan Budaya Menurut
UU No.6 Tahun 2014 (Study Di Desa Way Harong Kecamatan
Way lima)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang monaqosyah Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. Susiadi AS., M. Sos.I
NIP.195808171993031002

Pembimbing II

Eti Karini, S.H., M.Hum
NIP.197308162003122003

Mengetahui,

Ketua Prodi Siyasah

Drs. Susiadi AS., M. Sos.I
NIP.195808171993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ***TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN KEPALA DESA DALAM MEMPERSATUKAN KEANEKARAGAMAN SUKU DAN BUDAYA MENURUT UU NO.6 TAHUN 2014 (STUDY DI DESA WAY HARONG KECAMATAN WAY LIMA)***, Disusun Oleh: **Restu Irawan, NPM. 1321020155**

Jurusan: SIYASAH. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Pada Hari jumat Pukul 08:00WIB, Tanggal 10 bulan Mey di Ruang Sidang Jurusan Siyasaah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H

Sekretaris : Hendriadi S.H.I., M.H.I

Penguji I : Drs. H. Ahmad Jalaludin, S.H., M.M

Penguji II : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.

Mengetahui,
Dekan Syari'ah



Dr. Alamsyah, S. Ag., M.Ag.
NIP.1970090119970301002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat 13)"^{1,2}



¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 317

PERSEMBAHAN

Segala rasa syukur dan terimakasihku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta ayah Royani dan ibu Weda Nengsih yang tidak berhenti mendoakanku, menyayangiku, mengajarkanku dalam segala hal, dan menemani disetiap langkahku untuk menggapai cita-citaku.
2. Saudara saudaraku tercinta, kakakku Riki Munandar, dan adikku Duwi Okta Sari yang selalu memberikan semangat kepadaku
3. Kepada masyarakat desa Way Harong yang mendukung kemajuan pendidikan

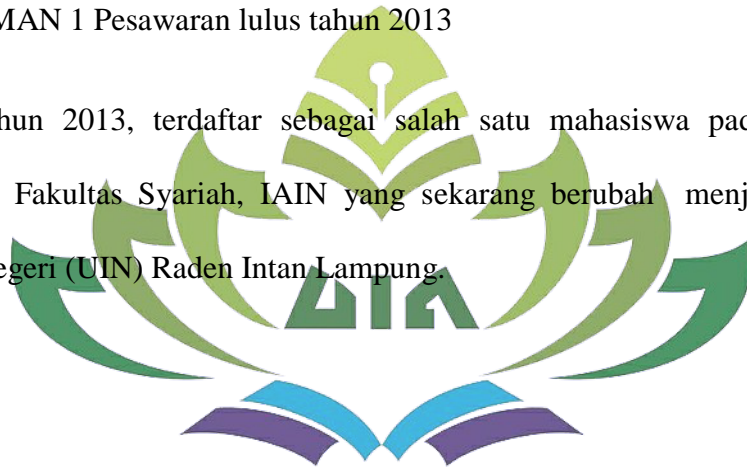


RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap RESTU IRAWAN dilahirkan didesa Way Harong Kecamatan Way Lima pada tanggal 04 September 1994. Anak pertama dari dua bersaudara, dengan seorang ayah bernama Royani dan seorang ibu bernama Weda Ningsih. Untuk pertama kalinya menempuh pendidikan di:

- ❖ SD 2 Way Lima lulus tahun 2007
- ❖ MTs 1 Pesawaran lulus tahun 2010
- ❖ MAN 1 Pesawaran lulus tahun 2013

Pada tahun 2013, terdaftar sebagai salah satu mahasiswa pada program S1 Siyasah, Fakultas Syariah, IAIN yang sekarang berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Asaalamu'alaikum warahmatullohi wabarokatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Mempersatukan Keanekaragaman Suku Dan Budaya Menurut UU No.6 Tahun 2014(Study Di Desa Way Harong Kecamatan Waylima). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Syariah pada Program Siasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan, baik moril maupun materil dari banyak pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih sedalam dalamnya kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag selaku dekan 1 fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Drs.Susiadi AS.,M. Sos.I selaku pembimbing akademik I dan Eti Karini, S.H., M.Hum selaku pembimbing akademik II yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi nasehat, doa serta kepercayaan dalam penulisan skripsi ini.
3. Tim penguji
4. Seluruh dosen serta karyawan fakultas syari'ah uin raden intan lampung.

5. Alfian s. Kom selaku kepala desa way harong yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian pada pemerintah desa way harong kec way lima
6. Seluruh staff dan masyarakat desa, tokoh agama tokoh masyarakat tokoh adat, dan tokoh pemuda yang telah membantu kegiatan penelitian pada desa Way Harong Kecamatan Way Lima.
7. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan perhatiannya, do'a, dukungan serta kasih sayang dan semangat.
8. Saudara saudariku tercintayang selalu memberi dukungan serta semangat kepadaku.
9. Sahabat sahabatku yang tergabung dalam komunitas ETD Lampung M Sholeh Hambali, Riska Aprianti, Nasirulah, Rudini, Fahmi dan sahabat yg lain yang selalu memberikan dukungan.
10. Teman teman seperjuangan Siasah C angkatan 2013 yang selalu saling mendukung dan bersama sama, seleai sampi wisuda terimakasih.

Hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT untuk senantiasa membalas jasa serta budi baik semua pihak pihak yang selalu mendukung dan membantu dalam penyusunan. Dan harapannya, skripsi dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Bandar Lampung Januari 2019
Penulis

Restu irawan
NPM 1321020155

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| ABSTRAK | |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | |
| MOTTO | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |
| KATA PENGANTAR..... | |
| DAFTAR ISI..... | |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 3 |
| C. Latar Belakang Masalah..... | 4 |
| D. Rumusan Masalah | 8 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 9 |

BAB II PERAN KEPALA DESA DALAM MEMPERSATUKAN KERAGAMAN SUKU DAN BUDAYA

| | |
|--|----|
| A. Pengertian Peran..... | 16 |
| B. Jenis Peran..... | 17 |
| C. Keragaman Suku Bangsa dan Budaya | 18 |
| D. Peran Kepala Desa Dalam Menyatukan Suku, Bangsa, dan Budaya Menurut UU No. 16 tahun 2014 | 25 |
| E. Peran Kepala Desa (Pemimpin) dalam Menyatukan Suku Bangsa dan Budaya menurut tinjauan hukum islam | 38 |

BAB III HASIL PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Desa Way Harong..... | 46 |
| 1. Sejarah Desa | 46 |
| 2. Pemerintahan Desa..... | 47 |
| 3. Gambar Letak Geografis Desa | 52 |
| 4. Gambar Letak Kondisi Demografi Desa..... | 52 |
| 5. Sarana dan Prasarana Desa | 56 |
| B. Peran Kepala Desa dalam Upaya Mempersatukan Suku Bangsa dan Budaya di Desa Way Harong | 60 |
| 1. Peran Kepala Desa | 60 |
| 2. Pendekatan yang dilakukan Kepala Desa dalam Mempersatukan Suku dan Budaya..... | 62 |

| | |
|--|----|
| 3. Faktor yang Menghambat dalam Mempersatukan Suku Bangsa dan Budaya | 64 |
| 4. Faktor yang Mendukung dalam Mempersatukan Suku Bangsa dan Budaya | 66 |

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN KEPALA DESA DALAM MEMPERSATUKAN KEANEKARAGAMAN SUKU DAN BUDAYA DI DESA WAY HARONG

| | |
|--|----|
| A. Peran kepala desa dalam mempersatukan keanekaragaman suku dan budaya di desa Way Harong | 68 |
| B. Tinjauan hukum islam terhadap peran kepala desa dalam mempersatukan keanekaragaman suku dan budaya di Desa Way Harong. | 70 |

BAB V PENUTUP

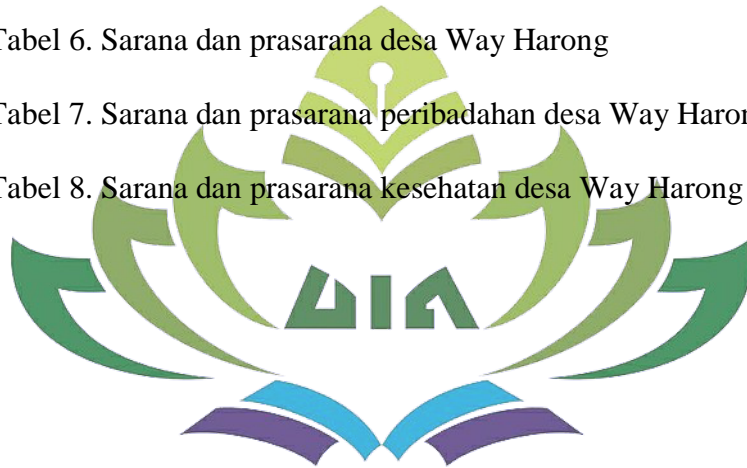
| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 77 |
| B. Saran..... | 78 |

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Jumlah penduduk desa Way Harong berdasarkan jenis kelamin
2. Tabel 2. Komposisi penduduk desa Way Harong menurut agama
3. Tabel 3. Komposisi penduduk desa Way Harong menurut pekerjaan
4. Tabel 4. Komposisi penduduk berdasarkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat
5. Tabel 5. Komposisi pedukuhan berdasarkan suku bahasa
6. Tabel 6. Sarana dan prasarana desa Way Harong
7. Tabel 7. Sarana dan prasarana peribadahan desa Way Harong
8. Tabel 8. Sarana dan prasarana kesehatan desa Way Harong



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan skripsi ini lebih lanjut, lebih dahulu akan menjelaskan pengertian judul skripsi dengan maksud untuk menghindari kesalah pahaman pengertian pembaca. Adapun penjelasan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah : Hasil meninjau pandangan pendapat (sudah menyelidiki, mempelajari sebagainya)
2. Hukum Islam adalah : Menurut ulama ushul ialah syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang muallaf secara perintah atau diperintahkan atau berupa ketetapan (takrir)
3. Peran adalah : Pemain sandiwara tukang lawak pada permainan ma'yunng peranan sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa balok yang menyambung tiang rumah sebelah atas tempat kasau kasau bertumpu¹.
4. Kepala Desa adalah : Orang yang mengepalai atau memimpin desa; lurah.²
5. Mempersatukan adalah : Menjadikan bersatu menyatukan mengumpulkan.³

¹Muhamad Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern* (Pustaka AMANI :Jakarta 2013)H.304

²*Ibid.*h.176

6. Suku adalah : Golongan bangsa dari bagian bangsa yang besar kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan akan identitas perbedaan kebudayaan, kehususan bahasa⁴.
7. Budaya adalah : Pikiran, akal budi, adat kebiasaan, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju) atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah⁵.
8. Pemerintah adalah : Kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara.⁶
9. Desa adalah : Kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).⁷
10. Desa Way Harong : Merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran yang terdapat berbagai suku dan budaya didalamnya.

Dari beberapa uraian diatas, maka dimaksud dari judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Mempersatukan Keaneka Ragaman Suku Dan Budaya Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Way Harong Kecamatan

³Ibid.h.390

⁴Ibid. h.466

⁵Ibid. h.46

⁶ A. Ubaedillah Dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga Negeraan*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2003)H.122.

⁷ <http://Kbbi.web.id>, akses 4 april 2017

Waylima)” adalah suatu kajian atau analisis yang akan memfokuskan tentang pendekatan sosiologi kepada masyarakat.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun beberapa alasan yang menyebabkan penulis tertarik dan memilih judul tersebut yaitu:

1. Alasan objektif

- a. Masih banyak masyarakat di Desa Way Harong Kecamatan Waylima yang belum mampu bersosialisasi dengan baik karena banyaknya perbedaan suku dan budaya.
- b. Peran Kepala Desa yang belum tepat dalam mempersatukan keanekaragaman yang ada pada masyarakat Desa Way Harong Kecamatan Waylima.
- c. Peneliti dapat mengumpulkan data dengan mudah karena kepala desa dan masyarakat yang siap membantu peneliti agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

2. Alasan Subjektif

Karena judul tersebut diatas sesuai dengan spesialisasi keilmuan penulis yaitu jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) serta didukung oleh tersedianya literatur baik primer maupun sekunder dan data penelitian lapangan yang menunjang dalam penelitian tersebut.

C. Latar Belakang Masalah

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁸

Indonesia merupakan negara berdaulat yang hampir 74 tahun memperoleh kemerdekaan dari kolonial dan sekarang mampu berdiri dengan kaki sendiri, kemerdekaan mempunyai makna yang luas artinya bahwa bangsa Indonesia kebebasan untuk mengatur sendiri berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik ekonomi sosial dan sebagainya. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa daerah, Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Dimana setiap suku memiliki kebudayaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Suku bangsa merupakan dari suatu negara, dalam setiap suku memiliki norma sosial yang mengikat masyarakat didalamnya agar taat dengan sesuai dengan yang didalamnya.

Untuk menuju integritas nasional yaitu keseimbangan antar suku bangsa diperlukan toleransi antar masyarakat yang berbeda asal usul kedaerahannya. Selain itu faktor sejarah lah yang mempersatukan ratusan

⁸ Rudi, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandar Lampung: PKPPUU FH UNILA, 2003), h.

suku bangsa yaitu semboyan Bhineka Tunggal Ika yaitu memiliki banyak perbedaan namun memiliki tujuan yang sama, serta diperkuat dengan suatu sumpah yaitu sumpah pemuda pada 28 oktober 1982.

Bagi umat Islam perbedaan suku dan budaya adalah satu nikmat yang diberikan Allah SWT agar saling mengenal, karena Allah menciptakan alam ini dengan suatu yang berbeda beda supaya saling mengenal, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat 13)*⁹

Namun erat kaitannya dengan adat bagi masyarakat umumnya yang menganggap bahwa adat merupakan hukum kedua yang dibenarkan dalam keseharian, banyak yang bisa dikaji lagi mengenai adat kehidupan sehari-hari, baik berupa aktifitas kecil maupun untuk kegiatan penting berupa hari besar agama, pernikahan, hari kelahiran, dan lainnya.

Sepertihalnya adat pernikahan yang terjadi di Desa Wayharong mengenai pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang diharapkan

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 317

hanya sekali terjadi dalam seumur hidup. Maka tak jarang adat semacam apapun akan dijalankan demi berlangsungnya pernikahan yang diinginkan.

Indonesia merupakan negara berkembang, terus berupaya melakukan pembangunan disegala sektor, baik pembangunan fisik maupun mental, hal tersebut ditunjukan guna meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus tercapainya suatu tujuan nasional, pembangunan nasional mempunyai tujuan umum untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat maupun kemakmuran yang adil dan merata.

Provinsi Lampung secara geografis terletak diujung pulau Sumatra, berdekatan dengan pulau Jawa yang padat penduduk. Sejak zaman kolonial Lampung telah menjadi sasaran tempat pemindahan penduduk oleh pemerintahan belanda dengan tujuann untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja diperkebunan dikolonial. Secara formal Lampung dijadikan tonggak sejarah di Indonesia sejak tahun 1905, hal ini ditandai oleh pemindahan para transmigran sebanyak 155 KK dari pulau Jawa di daerah ke desa baglen Gedung Tataan. Untuk mengenang sejarah transmigrasi di Indonesia didirikan museum transmigrasi di desa bagelen Kabupaten Pesawaran''.¹⁰ Inilah awal mula perkembangan suku dan budaya di Lampung, yaitu dengan hadirnya para transmigrasi dengan membawa kebudayaannya masing masing serta menyebar luas ke daerah-

¹⁰ Buchori Asyik Dan Trisnaningsih *Provisi Lampung Dari Daerah Penerima Menjadi Potensi Daerah Pengirim Trasmigran* (Histokokultura, Jogjakarata, 2015) h.v.

daerah di sekitar desa bagelen. Yang menimbulkan persaingan dengan penduduk lokal.

Begitu juga di Desa Way Harong Kecamatan Waylima menurut sejarah datangnya seorang perantau yang bernama H.Asgari beserta rombongan yang berasal dari daerah Banten. Desa Way Harong sendiri dulunya hanya hutan belukar, lalu merekalah para pendatang dari pulau jawa yang membuka hutan tersebut untuk dijadikan tempat tinggal dan lahan pertanian. Begitupun selanjutnya banyak para transmigran yang tinggal di Desa Way Harong. Dengan banyak masyarakat pendatang dari Banten maupun pulau Jawa lainnya, sehingga membawa kebudayaan masing-masing ke Desa Way Harong. Dengan berbagai suku dan budaya yang ada sehingga menimbulkan banyaknya permasalahan didalam bermasyarakat hingga saat ini, seperti hal nya permasalahan dalam berkomunikasi sesama masyarakat yang berbeda suku masih sulit terjalin dikarenakan pendidikan yang rendah, tradisi kebiasaan masyarakat yang patuh aturan nenek moyang, serta masyarakat yang fanatik terhadap sukunya sehingga menganggap sukunya lebih baik atau lebih tinggi derajatnya dibanding suku lain yang ada di Desa Way Harong, Untuk itu pemerintah Desa harus dapat bisa mempersatukan keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Desa Way Harong Kecamatan Waylima tersebut.

Pembicaraan tentang peran kepala desa haruslah melibatkan diskusi tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Sebab disatu pihak kita dapat mengatakan bahwa jabatan kepala negara adalah hak manusia.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah peran kepala desa dalam mempersatukan keanekaragaman suku dan budaya di Desa Way Harong sudah sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap peranan kepala desa dalam mempersatukan suku dan budaya di Desa Way Harong ?

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam mempersatukan suku dan budaya di Desa Way Harong
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap peranan kepala desa dalam mempersatukan suku dan budaya di Desa Way Harong.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis diharapkan penulis ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya hukum tata negara.

b. Kegunaan praktis

1. Hasil Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepala desa dalam mempersatukan suku dan budaya.
2. Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode penelitian

1. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah “suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta fakta, sifat sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu”¹¹

Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana tinjauan UU No 6 tahun 2014 dan Hukum Islam terhadap peran kepala desa dalam mempersatukan keaneka ragaman suku dan budaya di desa Way Harong.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹² Peneliti harus terjun sendiri kelapangan secara aktif dan menggunakan tehnik

¹¹ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

¹² Kantini Kantono, *Pengantar Metodologi Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1996).

observasi sistematis atau observasi berkerangka ialah observasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan study kasus. Study kasus yang dimaksudkan bahwa penelitian mengambil subjek yang diteliti adalah mereka atau masyarakat yang belum dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungannya serta peran dari kepala desa wayharong kecamatan waylima. Data diambil dari desa wayharong kecamatan waylima berjumlah 583 orang.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan dan mendeskripsikan secara faktual dan aktual secara sistematis mengenai Peran Kepala Desa Dalam Mempersatukan Keanekaragaman Suku dan Budaya Menurut Hukum Islam dan UU No.16 Tahun 2014 di Desa Way Harong Kecamatan Waylima.

3. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Yang dimaksud sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.¹³ Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data-data kongkrit dan yang dapat memberikan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

¹³ Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 195

¹⁴ *Ibid.*,

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dihasilkan dari lapangan yaitu dengan melakukan wawancara terhadap para responden, serta pengumpulan data melalui wawancara dan observasi dengan kepala desa Way Harong untuk mengetahui perannya dalam mempersatukan keanekaragaman suku dan budaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung dalam observasi diperoleh melalui bahan kepustakaan, dan terdiri dari hukum-hukum Islam dan undang-undang seperti Hadist dan Al-qur'an serta data penunjang lainnya yang relevan diantaranya jurnal dan dokumen desa¹⁵

c. Data Tersier

Adalah data yang mendukung data sekunder yang terdiri dari surat kabar local, video dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu:

a. Observasi

Adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian.¹⁶

¹⁵ Ronny Hartono Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta : Ghaila, 1994),h.11

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung:Alfabeta, 2013) h.196

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar

b. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.¹⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subjek yang diteliti, populasi disebut juga univers tidak lain dari daerah generalisasi yang diwakili oleh sampel.¹⁸

Adapun populasi dalam penelitian ini menurut Suharsimi Arikunto apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, (Alfabeta, Bandung, 2012), h. 232

¹⁸Wardi Bachtiar, *Metodelogi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), h.83

maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau lebih.¹⁹ Jadi total populasi diambil sebanyak 583 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian wakil dari populasi yang akan diteliti. Untuk lebih jelasnya, teknik yang digunakan yaitu menggunakan jenis *purposive sampling* yaitu: memilih sekelompok subjek yang didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkutan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁰

Berdasarkan pendapat diatas kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Tokoh agama yang berjumlah 12 orang di Desa Way Harong.
- 2) Tokoh adat yang berjumlah 6 orang di Desa Way Harong
- 3) Tokoh masyarakat berjumlah 24 orang yang tinggal di desa Way Harong.

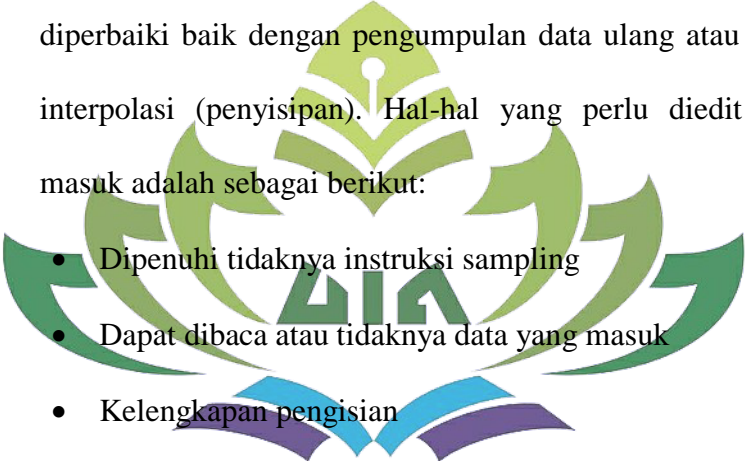
¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta Revisi, 1996), h.104

²⁰ *Ibid*, h. 83

6. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang atau pun dengan interpolasi (penyisipan). Hal-hal yang perlu diedit pada data masuk adalah sebagai berikut:

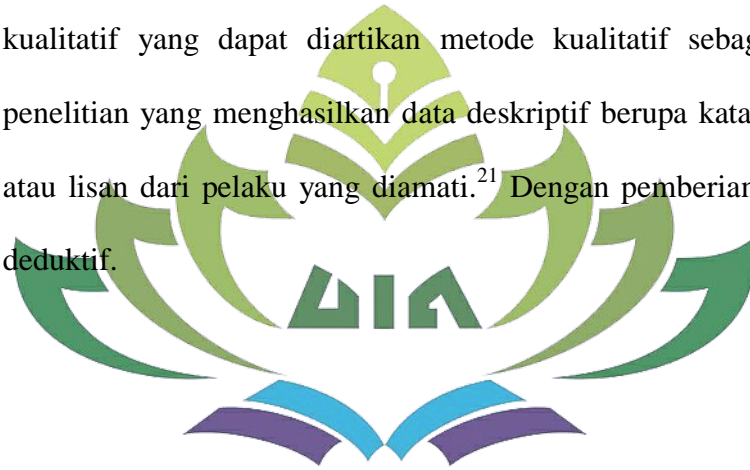
- 
- Dipenuhi tidaknya instruksi sampling
 - Dapat dibaca atau tidaknya data yang masuk
 - Kelengkapan pengisian
 - Keserasian(*consistency*)
 - Apakah isi jawaban dapat dipahami

b. Sistematis

Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Dengan demikian penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

7. Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut, seluruh data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah, dikelompokkan masing-masing yaitu data yang mengenai hasil observasi, dan wawancara kepada sampel yang telah dijelaskan penulis yaitu kepala desa Way Harong kecamatan Waylima. Dengan cara mengumpulkan data, memilih data, mengelompokkan data, menyusun data dan akhirnya menyimpulkan data. Dengan menggunakan analisa kualitatif yang dapat diartikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang diamati.²¹ Dengan pemberian kesimpulan deduktif.



²¹ Lexi J. Meleong, *Meode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), h. 228

BAB II

PERAN KEPALA DESA DALAM MEMPERSATUKAN KERAGAMAN SUKU DAN BUDAYA

A. Pengertian Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹ Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh, seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan menurut Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peranan disebut sebagai perangkat peran. Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status social khusus.

¹ Muhamad Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern* (Pustaka AMANI :Jakarta 2013) h. 244

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran.

Peran lebih mengedepankan fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran seseorang mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran merupakan bagian dari peraturan (norma-norma) yang membimbing seseorang di dalam masyarakat.
2. Peran adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan individu di dalam suatu masyarakat.
3. Peran adalah perilaku individu yang memiliki peranan penting di dalam struktur sosial masyarakat.

B. Jenis-Jenis Peran

Mengacu pada penjelasan di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis, adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

2. Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

C. Keragaman Suku Bangsa dan Budaya

Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalaman, serta menjadi landasan bagi tingkah lakunya. Dengan demikian demikian, kebudayaan merupakan serangkayan aturan aturan, petunjuk petunjuk, rencana rencana, dan strategi strategi yang terdiri atas serangkayan model model kognitif yang dimiliki manusia dan lingkungan secara kolektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindak tanduknya.

Indonesia terdapat macam-macam suku bangsa dan bermacam-macam kebudayaan. Sejak zaman dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dalam semboyan “Bhinneka tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan.² Orang-orang yang tergolong dalam satu suku bangsa tertentu, pastilah mempunyai kesadaran dan identitas diri terhadap kebudayaan suku

²Hidayah, Zulyani. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h. 17

bangsanya, misalnya dalam penggunaan bahasa daerah serta mencintai kesenian dan adat istiadat.³

Keragaman budaya atau *cultural diversity* adalah keniscayaan yang ada di bumi Indonesia.⁴ Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan kelompok bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Dengan jumlah penduduk 200 juta orang dimana mereka tinggal tersebar di pulau-pulau Indonesia. Mereka juga mendiami dalam wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi, mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan.⁵

Kebudayaan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhaya* yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal.⁶ Dengan demikian kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Kata kebudayaan dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan istilah *culture*. Dalam bahasa Belanda disebut *cultuur*. Kedua bahasa ini diambil dari bahasa latin *colore* yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah. Dengan demikian *culture* atau *cultuur* diartikan sebagai segala

³*Ibid*, h. 18

⁴ Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2002) h. 9

⁵ *Ibid.*, h. 8

⁶*Ibid.*, h. 11

kegiatan manusia untuk mengola dan mengubah alam. Menurut Melville J. Herkovits memandang bahwa kebudayaan suatu yang *superorganic* karena kebudayaan yang turun-temurun dari generasi ke generasi yang tetap hidup terus walaupun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran.⁷

Ciri-ciri perbedaan suku bangsa secara fisik seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain. Bahasa yang dipergunakan misalnya bahasa batak, bahasa jawa, bahasa sunda dan banyak lagi bahasa-bahasa daerah di Indonesia serta ciri khas lain seperti adat istiadat dan kesenian daerah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebudayaan bahwa pembentukan kebudayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Latar Belakang Historis

Dalam perjalanan sejarah menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunani (wilayah China bagian selatan). Sebelum tiba di Nusantara mereka berhenti di berbagai tempat dan menetap dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin hingga beberapa generasi. Selama bermukim di tempat-tempat tersebut, mereka melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Mereka mengembangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan-keterampilan khusus sebelum melakukan perjalanan. Dengan perbedaan pengalaman dan pengetahuan telah menyebabkan timbulnya

⁷*Ibid.*, h. 18

perbedaan suku bangsa dengan budaya yang beraneka ragam di Indonesia.⁸ kebudayaan indonesia adalah berbagai aturan, tradisi atau kebiasaan rakyat indonesia yang diterima dan dipertimbangkan hingga menjadikan sebagai pedoman serta dilakukan selama turun temurun hingga menjadi sebuah struktur yang mempunyai berbagai unsur kehidupan didalamnya. Sehingga sejarah kebudayaan indonesia mampu dijadikan tolak ukur serta acuan untuk mempelajari bagai mana perkembangan kebudayaan di indonesia yang sebenarnya.

2. Perbedaan Kondisi Geografis

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar didunia dengan memiliki 5 pulau utama yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tentunya setiap pulau ini memiliki kondisi geografis yang berbeda diantara pulau satu dengan pulau yang lain di Indonesia.

Perbedaan-perbedaan kondisi geografis telah melahirkan berbagai suku bangsa dan keberagaman budaya Indonesia. Hal itu berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi, perwujudan kebudayaan yang ada contohnya nelayan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Sehingga mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan lingkungan geografis mereka tanpa mengganggu kebudayaan yang lainnya.⁹ kondisi geografis berkaitan erat dan berpengaruh terhadap keberagaman budaya di indonesia. Kondisi geografis tersebut

⁸Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi*, (Jakarta: UI Press, 1987) h. 81

⁹*Ibid.*, h. 81

antara lain: lokasi geografis suatu tempat sangat berpengaruh pada kebiasaan hidup suatu masyarakat. Masyarakat yang tinggal dipegunungan maka akan memiliki kebudayaan bertani sebagai mata pencaharian dan membuat atap rumah yang tidak terlalu tinggi dan hangat. Sedangkan masyarakat untuk masyarakat yang tinggal di daerah pantai maka akan memiliki budaya berladang atau nelayan dan akan membuat atap rumah setinggi mungkin untuk mencegah kegerahan disiang hari.

3. Keterbukaan terhadap Kebudayaan Luar

Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keanekaragaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing pertama yaitu ketika orang-orang India, China, dan Arab disusul oleh bangsa Eropa. Bangsa tersebut datang membawa kebudayaan yang beranekaragam. Daerah-daerah yang relatif terbuka, khususnya daerah pesisir paling cepat mengalami perubahan karena:

a. Dengan semakin banyaknya sarana dan prasarana transportasi

Hal ini yang menyebabkan keterbukaan terhadap kebudayaan luar semakin cepat dikarenakan transportasi yang dapat memindahkan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia

dalam melakukan aktivitas sehari-hari sehingga memudahkan untuk melakukan kegiatan sosial.

b. Hubungan antar kelompok semakin Intensif

Seiring dengan perkembangan jaman yang makin maju, teknologi pun kian berkembang sangat pesat, perkembangan teknologi modern tahun demi tahun selalu memunculkan inovasi baru yang bisa menunjang serta mempermudah berkomunikasi antar perorangan atau kelompok secara intensif.

c. Semakin sering mereka melakukan pembauran

Dengan sering melakukan pembauran masyarakat mudah beradaptasi serta memahami satu sama lain sehingga mencegah kesalahpahaman di antaranya dan menimbulkan hubungan yang harmonis.

Sementara daerah-daerah yang terletak jauh dari pantai umumnya tidak banyak terpengaruh budaya luar, sehingga kebudayaannya berkembang dengan corak khas. Contoh; Jakarta salah satu contoh Ibu Kota pelabuhan, memiliki corak kebudayaan yang cukup beragam yaitu dengan adanya budaya Betawi memiliki sedikit budaya China, Arab, dan India. Hal ini diakibatkan oleh beragamnya orang yang datang atau singgah di kota ini sehingga terjadinya pembauran kebudayaan.

Sifat-sifat dari kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. *Adaptif*

Kebudayaan bersifat *adaptif* artinya kebudayaan selalu mampu menyesuaikan diri, sifat *adaptif* ini akan melengkapi manusia pendukungnya dengan menyesuaikan diri pada hal-hal seperti kebutuhan fisiologis badan mereka sendiri, lingkungan fisik, lingkungan geografis, sampai lingkungan sosial.¹⁰

2. *Integratif*

Kebudayaan bersifat *integratif* artinya kebudayaan memadukan semua unsur dan sifat-sifatnya menjadi satu, bukan sekumpulan kebiasaan yang terkumpul secara acak-acakan saja. Karena itulah kebiasaan yang dimiliki dalam suatu kebudayaan tidak dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam budaya lain.¹¹

3. *Dinamis*

Kebudayaan bersifat *dinamis* artinya kebudayaan itu selalu berubah dan terus bergerak mengikuti dinamika sosial budaya masyarakat. Dinamika kehidupan sosial budaya terjadi sebagai akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan sekitar, penafsiran-penafsiran atau interpretasi yang berubah tentang norma-norma, dan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku.¹²

h. 43 ¹⁰Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2010)

¹¹*Ibid.*, h. 44

¹²*Ibid.*, h. 44

Kebudayaan serta suku bangsa Indonesia adalah kebudayaan bersama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang merupakan puncak tertinggi dari kebudayaan-kebudayaan daerah.¹³ Kebudayaan nasional sendiri memiliki banyak bentuk karena pada dasarnya berasal dari jenis dan corak yang beraneka ragam, namun hal itu bukanlah menjadi masalah karena dengan hal itulah bangsa kita memiliki karakteristik tersendiri. Untuk menjaga dan memelihara eksistensi kebudayaan bangsa kita, kita bisa melakukan banyak hal seperti mengadakan lomba-lomba dan seminar-seminar yang bernafaskan kebudayaan nasional sehingga akan terjagalah satu kebudayaan dan suku bangsa dari generasi dan generasi berikutnya.¹⁴

D. Peran Kepala Desa Dalam Menyatukan Suku Bangsa Budaya Menurut UU No. 16 tahun 2014

Seperti yang kita ketahui setiap negara memiliki sistem hukum sendiri-sendiri. Sumber hukum Indonesia telah diatur dalam ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan Perundang-undangan RI. Di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia dikenal tiga sistem hukum yakni, sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat yang mempunyai pengaruh sendiri-sendiri di dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia.¹⁵ Sistem hukum adat bersumber dari kebiasaan-kebiasaan rakyat Indonesia sebagai cerminan dari kepribadian bangsa. Hukum adat adalah hukum nonstatutair, di mana

¹³ Budiman, Arief. *Budaya Masyarakat*, (Jakarta Timur: PT Intan, 2011) h. 19

¹⁴ Budiyo. *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Erlangga, 2008) h. 29

¹⁵ Djamanat, Samosir. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2013) h, 11

sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam.¹⁶

Pasal-pasal yang termuat dalam Undang-undang desa yang berhubungan dengan peran kepala desa dalam mempersatukan keaneka ragaman suku dan budaya:

1. Pasal 4 yang berbunyi

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia
- c. Melestariakan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dana desa guna kesejahteraan bersama
- e. Membentuk pemerintah desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
- h. Mewujudkan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

2. Pasal 18 berbunyi

“Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

¹⁶*Ibid.*, h. 12

berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa”. Yang dimaksud dengan “hak asal-usul dan adat istiadat desa” adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷ Di dalam UU desa hak asal usul dan hak tradisional dinyatakan dalam asas rekognisi yaitu, yaitu negara memberi pengakuan dan penghormatan terhadap hak asal usul dan hak tradisional. Sehingga desa memiliki kewenangan dibidang hak asal usul dan adat istiadat desa, serta kewenangan desa yang bersumber dari hak asal usul.

3. Pasal 19 berbunyi

Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan asal-usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain

¹⁷Djamanat, Samosir. *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Persada Grafindo, 2013) h. 79

sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.¹⁸

Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.¹⁹

4. Pasal 3 UU RI No.28 Tahun 1999 berbunyi

Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas:

a. Asas Kepastian hukum

Yaitu suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat, adanya kepastian hukum dalam suatu negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang undangan yang ditetapkan pemerintah. Asas ini juga mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat admintrasi negara.

¹⁸*Ibid.*, h. 80

¹⁹Syamsudin dkk. *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998) h. 102

b. Asas Tertib penyelenggaraan pemerintahan

Ialah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengadiln penyelenggaraan pemerintah negara.

c. Asas Tertib kepentingan umum

Ialah asas yang mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif, maksudnya asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu.

d. Asas Keterbukaan

Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

e. Asas Proporsionalitas

Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. Asas Akuntabilitas

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku

5. Pasal 25 berbunyi

“Penyebutan nama lain untuk kepala Desa dan perangkat Desa dapat menggunakan penyebutan di daerah masing-masing”

Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, begitu pula segala istilah dan intitusi didesa dapat disebut nama lain dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan pengakuan pemerintah terhadap asal usul adat istiadat setempat.

6. Pasal 34 ayat 1 berbunyi

“Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa”. Disuatu desa bahwa pemilihan kepala Desa dipilih oleh masyarakat Desa sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Kepala desa dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh masyarakat atau penduduk setempat,. Usia minimal kepala desa adalah 25 tahun dan ia harus berpendidikan paling rendah SLTP, dan termasuk penduduk setempat. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan, yang dibentuk BPD, dan anggotanya terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

7. Pasal 47 ayat 3 berbunyi

“Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33”. Yang dimaksud dengan “musyawarah Desa” adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa

husus untuk pemilihan kepala Desa antar waktu (bukan musyawarah badan Permusyawaratan Desa) yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon, dan penetapan calon terpilih.

8. Pasal 54 ayat 1 berbunyi

“Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa”. Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh pemerintah desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa. Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah Desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya. Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.

9. Pasal 69 ayat 9 berbunyi

“Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa” maksudnya ialah agar masyarakat desa mengetahui dan memberikan arahan dan tanggapan terhadap rancangan peraturan desa yang akan diajukan.

10. Pasal 76 ayat 1 berbunyi

“Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar Hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan Ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa”. Maksudnya ialah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

11. Pasal 103 berbunyi

“Kewenangan Desa adat berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 a meliputi:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.
- b. Pengaturan dan pengelolaan ulayat atau wilayah adat.
- c. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat.
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa adat, dan

- g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat

12. Pasal 104 berbunyi

“Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dan huruf b serta pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman”.

Dengan memperhitungkan Undang-undang no. 16 tahun 2014 seperti beberapa pasal yang telah dijelaskan di atas, maka pemerintah desa atau kepala desa khususnya Desa Way Harong bertanggung jawab atas jarak pemisah antar suku yang terjadi di Desa Way Harong. Kepala Desa sangat berperan guna mempersatukan suku baik itu suku Sunda, Jawa, dan Lampung di desa Way Harong.

Dalam Permendagri itu disebutkan fungsi kepala Desa seperti menyelenggarakan pemerintahan, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, administrasi kependudukan, pernyataan dan pengelolaan wilayah.²⁰ Fungsi kepala desa lainnya adalah melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Kepala desa juga wajib

²⁰Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

melaksanakan seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan serta kesehatan. Pada ayat 3 disebutkan, fungsi kepala Desa lainnya adalah melakukan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.²¹

Kepala desa juga berfungsi secara sosial ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna.²² Fungsi lainnya adalah membangun hubungan kemitraan dengan lembaga lainnya. Sebagai orang nomor satu dalam struktur pemerintah desa, kepala desa memang memiliki tugas dan fungsi yang luas dan menyeluruh pada berbagai aspek kehidupan pemerintahan desa. Disatu sisi hal itu menempatkan kepala desa sebagai orang yang memiliki aksesibilitas kekuasaan yang luas baik keluar maupun ke dalam. Tetapi disisi lain kepala Desa juga menjadi orang yang paling memiliki resiko tinggi terhadap berbagai bentuk pertanggung jawaban kerja²³. Soalnya, melalui kepala desalah beragam keputusan dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa berpusat. Menguasai peraturan seperti ini bakal memberikan pemahaman mengenai seperti apa tugas dan fungsi kepala desa.

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) mengatur empat tugas utama kepala desa yaitu

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa

²¹*Ibid.*,

²²Suryaningrat, Bayu. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Lip 1979) h, 47

²³Syafiie, InuKencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982) h,

pemerintah dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Dalam hal ini ialah pemerintahan desa.

b. Melaksanakan pembangunan desa

Yaitu Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

c. Melaksanakan pembinaan masyarakat desa

Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain lain.

d. Memberdayakan masyarakat desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya merubah pola prilaku masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi kehidupan sehari hari dalam beberapa aspek diantaranya perlindungan sosial,

peningkatan kapasitas, peningkatan aksesibilitas dan pemanfaatan potensi lokal.

Dengan tugas yang diberikan kepala desa diharapkan bisa membawa desa ke arah yang diharapkan oleh UU ini. Pasal 26 ayat (1) menjelaskan tugas Kepala Desa, dalam melaksanakan tugas kepala desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang²⁴:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan kepala desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa
- i. Membangun sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

²⁴Wagio, Yudi. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1991) h,

- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan untuk menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi kepala desa menurut Permendagri No. 84 Tahun 2015 Pasal 6 disebutkan²⁵:

- (1) Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
- (2) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

²⁵*Ibid.*, h. 105

- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

E. Peran Kepala Desa (Pemimpin) dalam Mempersatukan Suku, Bangsa Budaya menurut tinjauan Hukum Islam

Kepala desa mempunyai andil dan tanggung jawab yang besar terhadap apa yang terjadi di desanya. Dalam Undang-undang positif terdapat banyak kewenangan yang dimiliki kepala desa, seperti apa yang telah disampaikan di sub bab sebelumnya, dan kali ini bagaimana seharusnya peran kepala desa dalam kaca mata Islam.

Kepala desa adalah sebuah pemimpin didalam desa yang mengatur dan menentukan kebijakan kebijakan dalam sebuah peraturan dalam desa. Dalam islam istilah kepala desa ialah pemimpin atau dikenal sebagai imamah. Kedudukan seorang pemimpin dalam islam sangatlah penting. Bahkan keberadannya pardu kifayah dimana setiap manusai akan berdosa apabila tidak adanya seorang pemipin pun dan dibebankan hukum tersebut

terbebas manakala salah seorang dari umat telah terpilih menjadi pemimpin.

Hukum islam ialah doktrin yang bersangkutan dengan perbuatan orang orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (takrir). Termasuk perbuatan tatacara dan tuntunan menjadi seorang pemimpin telah diatur dalam hukum Islam, keberadaan seorang pemimpin yang diakui oleh syariat menunjukan seorang pemimpin harus mengerti akan agamanya, ilmu yang membahas tentang pemeritahan dalam islam dikenal dengan fiqh siyasah.

Istilah Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *Fiqh* dan *Siyasah*²⁶. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar dari tafsiran kata *faqih* - *yafqohu* - *fiqhan* yng berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu²⁷. Sedangkan secara terminology, fiqh lebih popular didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²⁸ Adapun definisi fiqh siyasah menurut para ahli diantaranya menurut Ahmad Fathi, fiqh siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.²⁹

²⁶ Ahmad Saebani, Ahmad, *Fiqh Siyasah; Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) h. 84

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Djazuli, *Kaidah – Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) h. 106

²⁹ Ahmad Fathi Bahantsi, *Al-siyasah al-Jinaiyah fi al-Syari'at al-Islamiyah*

Sementara itu peran kepala desa khususnya desa Way Harong dalam memimpin suatu wilayah termasuk dalam objek kajian *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* merupakan hubungan antara pemimpin di satu tempat atau wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.³⁰ Oleh karena itu biasanya dibatasi hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Fiqh siyasah *dusturiyah* jika di implementasikan terhadap peran kepala desa maka terdapat cakupan sebagai berikut:

Imamah, Hak dan Kewajiban. Menurut Al-Mawardi adalah suatu kedudukan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.³¹ Berikut adalah istilah khalifah atau imam yang termuat dalam al-Qur'an, istilah khallifah yang terdapat dalam beberapa surat, antara lain:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."

³⁰ Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, (Bandung: 1971) h. 157

³¹ Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan 1993)

mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah ayat 30)

Terdapat hak rakyat diantaranya hak persamaan, hak diberlakukan secara adil, hak kebebasan berfikir, beraqidah, berpendapat, berbicara, berpendidikan dan memiliki tempat tinggal. Sedangkan hak imam/pemimpin hak dibantu, ditaati, dan mendapatkan imbalan, disamping hak juga terdapat kewajiban sebagai penyeimbang diantaranya, memelihara agama, menetapkan hukum-hukum diantara orang yang bersengketa, memerangi orang-orang yang menentang agama Islam setelah melakukan dakwah secara baik-baik, mengajarkan umat untuk menjaga agama dengan baik untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dimana kemaslahatan itu merupakan suatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (kemaslahatan) atau menghindari dari keburukan (kemudaratan) bagi manusia.³²

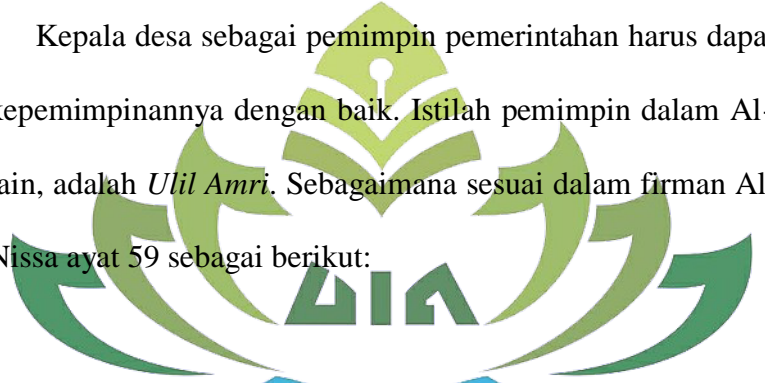
Sebagai umat Islam Rasulullah telah banyak memberikan pelajaran untuk umatnya, diantaranya ketika Rasulullah SAW. mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Sejarah tersebut berguna bagi umatnya yang mengalami problematikan yang sama, seperti pada Desa Way Harong misalnya.

Dalam membangun persatuan umat Islam yang berbeda suku, terdapat tiga hal esensial terkait peran Nabi Muhammad SAW. *Pertama*, mengubah

³² Muhamad Rusfi” Validasi Masalah Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum “ Jurnal Al Adalah Vol XXI No. 1,(Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung <http://www.Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Adalah.Html>, (6 Desember 2018).

kondisi masyarakat Arab dan memanfaatkan faktor politik untuk mempersiapkan kondisi yang diinginkan.³³ *Kedua*, strategi kultural untuk membuat ilustrasi “umat bersatu” dan menciptakan ruang bagi perkembangan pikiran dan pemahaman masyarakat terhadap tanggung jawab mereka.³⁴ *Ketiga*, menerapkan solusi yang ditawarkan Nabi Muhammad SAW. sebagai sarana untuk mewujudkan persatuan, yang mencakup solusi kebangsaan keagamaan, solusi kesukuan, dan solusi sosial individual.³⁵

Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Istilah pemimpin dalam Al-Quran, antara lain, adalah *Ulil Amri*. Sebagaimana sesuai dalam firman Allah Surah An-Nissa ayat 59 sebagai berikut:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada

³³Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 24

³⁴*Ibid.*, h. 24

³⁵*Ibid.*, h. 25

*Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa 59)*³⁶

Secara normatif keagamaan, Islam memerintahkan agar diantara umat manusia yang memiliki perbedaan latar belakang jenis kelamin, suku, golongan, dan lainnya melakukan kerjasama, tolong menolong, saling beradaptasi dan bersinergi, dan membentuk suatu bangsa guna mencapai sebuah kehidupan yang rukun, damai, toleran, sejahtera lahir dan batin, serta terpenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Para ulama umumnya mendasarkan pemikiran kebangsaan ini pada firman Allah SWT sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat 13)*³⁷

Di samping memerintahkan manusia agar membentuk sebuah kesatuan dengan saling kenal mengenal dan bersinergi, ayat tersebut juga meletakkan dasar-dasar kesatuan atau kebangsaan tersebut, yaitu kualitas moral dalam bentuk ketaqwaan sebagai ukuran tertinggi, dan bukan

³⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006).h, 80.

³⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010) h, 317

berdasarkan etnis suku, bahasa, jenis kelamin, tradisi, warna kulit dan sebagainya.³⁸ Dengan dasar kualitas moral dalam bentuk ketakwaan tersebut, maka yang menjadi dasar bangunan kebangsaan dalam pandangan Islam adalah sikap *egaliter* (kesederajatan) manusia dihadapan Tuhan, kualifikasi, kompetensi, kualitas, profesionalitas dan meritokrasi. Dalam Islam semua manusia memiliki peluang atau akses yang sama dalam mendapatkan berbagai kebutuhan hidupnya, namun hal itu harus bisa dicapai dengan tidak melanggar moral, serta dengan kemampuan yang dimilikinya. Dalam hubungan ini menarik apa yang dikatakan Harold Archibald Gibb, bahwa Islam masih akan mempersembahkan pembaktian terhadap umat.³⁹ Tidak ada satu masyarakat yang mencatat hasil dalam mempersatukan persamaan kedudukan, persamaan kesempatan dan usaha terhadap bangsa-bangsa manusia yang demikian banyak dan demikian aneka ragamnya.

Ayat diatas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, dan Ulil Amri. Dimana *Ulil Amri* adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan dan tugas.⁴⁰ Kepala desa adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan Desa. Hal itu membuat kepala desa harus mampu memimpin bawahannya

³⁸ Azra, Azyumardi. *Islam Substantif Agar Umat Tidak jadi Buih*, (Bandung: Mizan, 2000) cet. 1

³⁹ M.Hashem, *Kekaguman Dunia Terhadap Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) h. 57

⁴⁰ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997), h. 66

sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat.



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Way Harong

1. Sejarah Desa Way Harong

Nama Way Harong berasal dari bahasa Lampung Pesisir yaitu *way* yang berarti sungai atau air dan Harong yang berarti hitam. Jadi jika diartikan Way Harong adalah air atau sungai yang hitam. Desa Way Harong lahir pada tahun 1942 dan penduduk mayoritasnya adalah suku pribumi yaitu suku Lampung. Pada saat itu, Desa Way Harong dipimpin oleh Hi. Azhari. Setelah kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1948, Desa Way Harong ditetapkan sebagai Desa definitif yang secara administrasi masuk dalam Kecamatan Kedondong Kabupaten Lampung Selatan.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1997 terjadi pemekaran kecamatan. Kecamatan Kedondong memekarkan Kecamatan Way Lima, sehingga Desa Way Harong masuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Way Lima. Selanjutnya pada tahun 2007, Kabupaten Pesawaran dimekarkan dari Kabupaten Induknya yaitu Kabupaten Lampung Selatan, sehingga Desa Way Harong Kecamatan Way Lima masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Pesawaran.

Menurut sejarahnya, Desa Way Harong telah memekarkan tiga Desa. Ketiga Desa tersebut dahulunya merupakan dusun atau wilayah di dalam Desa Way Harong kemudian dimekarkan dan menjadi sebuah desa definitif. Pada tahun 1959, Desa Way Harong memekarkan Desa Sindang

Garut. Tahun 1967 Desa Way Harong memekarkan Desa Gunung Rejo dan pada tahun 1973, memekarkan Desa Margodadi.

Dari awal lahirnya Desa Way Harong telah dipimpin oleh sembilan Kepala Desa, diantaranya sebagai berikut:

1. Periode 1942 - 1948 dipimpin oleh Hi. Azhari
 2. Periode 1948 - 1963 dipimpin oleh Halimi
 3. Periode 1963 - 1968 dipimpin oleh Muhammad Nur
 4. Periode 1968 - 1976 dipimpin oleh Sahari
 5. Periode 1976 - 1984 dipimpin oleh Indra Kusuma
 6. Periode 1984 - 1996 dipimpin oleh Abdul Syukur
 7. Periode 1996 - 2004 dipimpin oleh Syafi'i
 8. Periode 2004 - 2012 dipimpin oleh Saihu
 9. Periode 2012 - sekarang dipimpin oleh Alfian
2. Pemerintah Desa Way Harong

Unsur pemerintah Desa Way Harong terdiri dari unsur eksekutif dan legislatif. Unsur eksekutif pemerintah Desa meliputi kepala Desa, sekretaris Desa, kepala-kepala urusan yaitu kepala urusan pemerintah, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan kesejahteraan rakyat (kesra), kepala urusan umum dan dua belas kepala dusun. Sedangkan unsur legislatif pemerintah Desa yaitu ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berjumlah sebelas orang.

a. Unsur Eksekutif (Aparat Desa)

Unsur eksekutif pemerintah Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa Way Harong dipilih secara langsung oleh masyarakat dari calon yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Desa Way Harong periode 2012 – 2018 yaitu bapak Alfian.

2. Sekertaris Desa

Sekertaris Desa Way Harong berkedudukan sebagai staf pembantu kepala Desa dan memimpin skretariat Desa yang mencakup urusan-urusan Desa seperti pemerintahan, keuangan, kesejahteraan rakyat (kesra), pembangunan dan urusan umum. Sekretariat Desa Way Harong yaitu Bapak Suhendar.

3. Kepala Urusan (Kaur)

Kepala urusan (kaur) berkedudukan sebagai pembantu sekertaris Desa dalam bidang pemerintahan, keuangan, kesejahteraan rakyat (kesra), pembangunan dan bidang umum. Adapun Kepala Urusan (kaur) di Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, berjumlah lima, dengan rincian yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Urusan Pemerintahan : A.Ansori
2. Kepala Urusan Pembangunan : Lukman. S
3. Kepala Urusan Keuangan : Saiful. A

- 4. Kepala Urusan Kesra : Badrullzaman
- 5. Kepala Urusan Umum : Dede Maulana

4. Kepala Dusun

Kepala dusun merupakan pemimpin dari tiap-tiap dusun yang merupakan wakil dari pemerintah Desa. Di dalam sebuah dusun, terbagi beberapa Rukun Tetangga (RT). Jumlah dusun di Desa Way Harong yaitu dua belas dusun, dengan rincian yaitu sebagai berikut:

- 
- 1. Kepala Dusun Suka Karya : Asrin A.B
 - 2. Kepala Dusun Sumber Jaya : Karno
 - 3. Kepala Dusun Way Harong Timur : Khairudin
 - 4. Kepala Dusun Cerita Dagang : M.Zen
 - 5. Kepala Dusun Way Harong Barat : Suryani
 - 6. Kepala Dusun Sumber Agung : Budiono
 - 7. Kepala Dusun Taman Jaya : A.Bukhari
 - 8. Kepala Dusun Sidorejo : Sumarno
 - 9. Kepala Dusun Gunung Kaso : Kasirun
 - 10. Kepala Dusun Suka Manah : Hamid
 - 11. Kepala Dusun Suka Maju : Subhi
 - 12. Kepala Dusun Suka Aman : Sukarma

b. Unsur Legislatif

Unsur legislatif pemerintah desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki kedudukan sejajar dan merupakan mitra dari

aparatus Desa. Selain itu, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi di tingkat Desa yang memiliki fungsi untuk mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa bersama kepala desa, serta melakukan pengawasan atas kinerja aparatus desa serta pengawasan atas peraturan desa yang telah dibuat. Adapun kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Way Harong Kecamatan Way Lima periode 2012-2018 yaitu sebagai berikut:

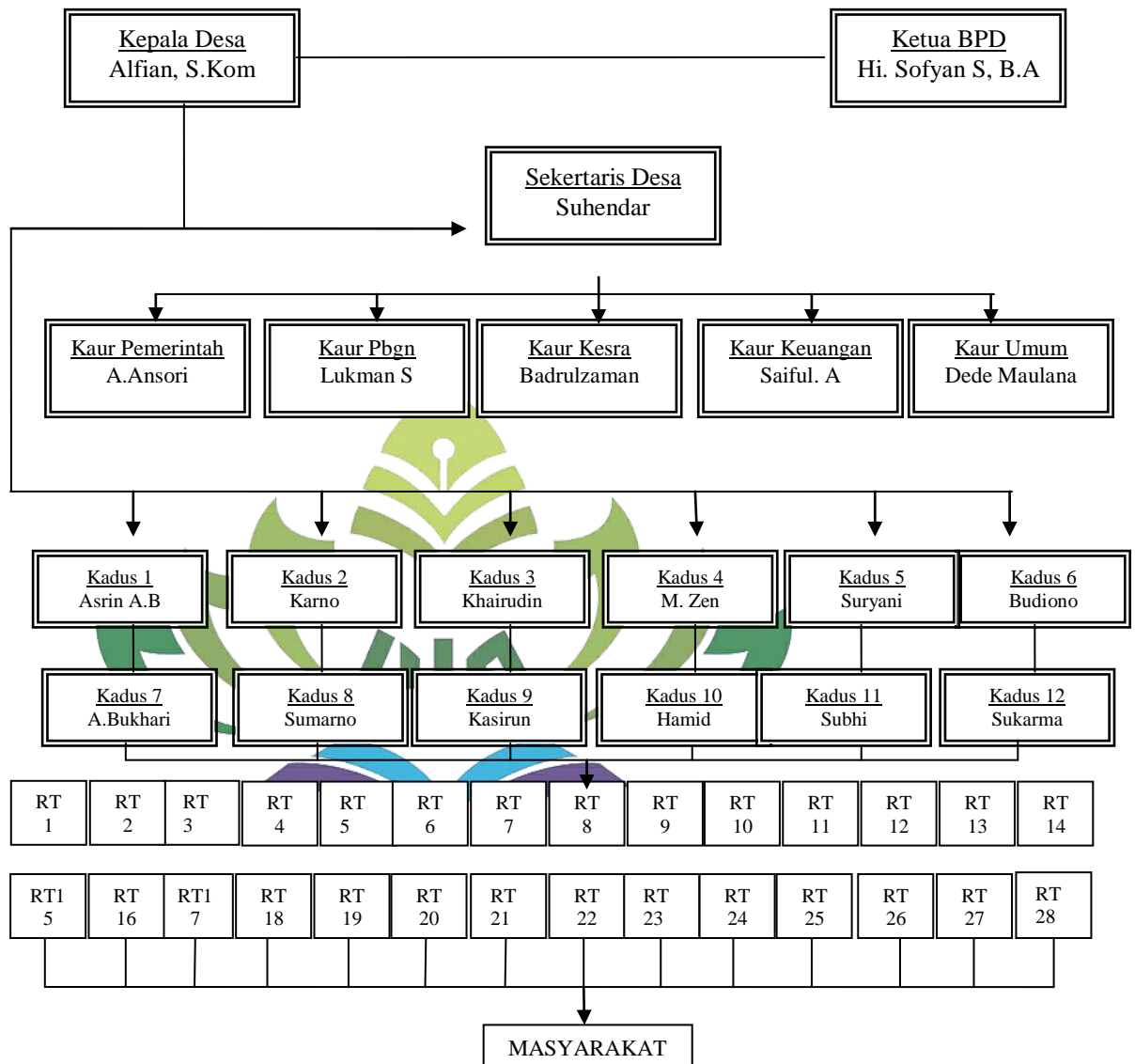
- Ketua : Hi. Sopyan Syam, B.A
- Wakil Ketua : Suhandi S.Ag
- Sekretaris : Samsul Bahri
- Anggota :



1. Mashudi
2. Ropikoh
3. Ipan Haryanto
4. Nasrudin
5. Nanang Husairi
6. Sukma
7. Said Arip
8. Suryanto

Selanjutnya, bentuk dari struktur Desa Way Harong, Kecamatan Way

Lima, Kabupaten Pesawaran, dapat dilihat dari bagan berikut:



Gambar: Struktur pemerintah Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran

3. Gambar Letak Geografis Desa Way Harong

Desa Way Harong salah satu dari 16 Desa di wilayah Kecamatan Way Lima yang terletak 4 Km ke arah selatan dari kota Kecamatan Desa Batu Raja mempunyai luas wilayah seluas 1035 Ha. Iklim Desa Way Harong sebagaimana Desa-desanya lainnya mempunyai iklim dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima, Desa Way Harong mempunyai suhu 34 derajat celcius. Luas tersebut, terbagi atas luas permukiman atau perumahan, fasilitas umum seperti masjid, mushola, sekolah, dan balai Desa. Batas Desa Way Harong sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Cimanuk
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Rejo
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Margodadi
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kota Dalam

4. Gambar Letak Kondisi Demografi Desa

a. Jumlah penduduk

Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran memiliki jumlah penduduk terbanyak diantara Desa-desanya lainnya di Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran yaitu sebanyak 5830 jiwa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Jumlah penduduk
Desa Way Harong berdasarkan jenis kelamin**

| Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|-------------------|----------------|
| Laki-laki | 2.800 jiwa | 48,02 % |
| Perempuan | 3.030 jiwa | 51,98 % |
| Jumlah | 5.830 jiwa | 100 % |

Sumber: Profil Desa Way Harong Kecamatan Way Lima tahun 2015

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat secara jelas bahwa perbandingan penduduk Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran antara jenis kelamin penduduk perempuan yang berjumlah 51,98 % lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki yang berjumlah 48,02% .

b. Komposisi penduduk menurut agama

Penduduk Desa Way Harong sebagian besar beragama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari rincian berikut:

**Tabel 3.2 Komposisi penduduk
Desa Way Harong menurut Agama**

| Agama | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|--------------|----------------|
| Islam | 5.830 | 100 % |
| Kristen | - | |
| Khatolik | - | |
| Hindu | - | |
| Budha | - | |
| Jumlah | 5.830 | 100 % |

Sumber: Profil Desa Way Harong tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, jika

dilihat dari komponen agama, bersifat homogen (memiliki kesamaan) dikarenakan semua penduduknya adalah beragama Islam.

c. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian atau pekerjaan

Mata pencaharian penduduk Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, sebagian besarnya adalah berprofesi sebagai buruh, kemudian sisanya adalah petani, karyawan, wiraswasta, tukang bangunan, dan jasa. Adapun rincian klasifikasi penduduk berdasarkan mata pencahariannya yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Komposisi penduduk
Desa Way Harong menurut pekerjaan**

| Pekerjaan | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|--------------|----------------|
| Karyawan | 297 | 9,27 % |
| Tani | 817 | 25,53 % |
| Pertukangan | 163 | 5,09 % |
| Buruh | 1.418 | 44,2 % |
| Pensiunan | 5 | 0,16 % |
| Jasa | 18 | 0,57 % |
| Wiraswasta | 483 | 15,09 % |
| Jumlah | 3.201 | 100 % |

Sumber: Profil Desa Way Harong tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, memiliki heterogenitas (beraneka ragam) dalam bidang pekerjaan, walaupun sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pola pikir masyarakat Desa Way Harong yang berbeda-beda atau beragam.

- d. Komposisi penduduk berdasarkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi pada profil desa Way Harong kecamatan Way Lima, terdapat beberapa pengelompokan anggota masyarakat yang merupakan tokoh adat, agama dan masyarakat yaitu:

Tabel 3.4 Komposisi penduduk berdasarkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat

| KETERANGAN | JUMLAH |
|------------------|----------|
| Tokoh adat | 6 orang |
| Tokoh agama | 12 orang |
| Tokoh masyarakat | 24 orang |

Sumber: hasil wawancara dengan aparatur desa

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hanya beberapa orang yang mewakili anggota masyarakat untuk menjadi tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Menurut kepala desa way harong selain pembagian tokoh di atas bahwasanya desa way harong terdiri dari 3(tiga) suku bahasa yaitu suku sunda, suku lampung, dan suku jawa.¹

Tabel 3.5 Komposisi pedukuhan berdasarkan suku bahasa

| No | Nama Pedukuhan | Suku Bahasa |
|----|------------------|-------------|
| 1 | Way Harong Barat | Sunda |
| 2 | Way Harong Timur | Sunda |
| 3 | Taman Jaya | Sunda |
| 4 | Suka Aman | Sunda |
| 5 | Suka Maju | Sunda |

¹. Wawancara dengan bapak Alfian.S.com selaku kepala desa way harong 19 desember 2018

| | | |
|----|---------------|---------|
| 6 | Suka Manah | Sunda |
| 7 | Suka Karya | Sunda |
| 8 | Sumber Jaya | Sunda |
| 9 | Sumber Agung | Jawa |
| 10 | Sido Rejo | Jawa |
| 11 | Gunung Kaso | Jawa |
| 12 | Cerita Dagang | Lampung |

Sumber: hasil wawancara dengan aparatur desa

5. Sarana dan Prasarana Desa Way Harong

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat mendukung semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya dengan terpenuhinya sarana dan prasarana pokok seperti sarana pendidikan, sarana peribadahan, dan sarana komunikasi dan informasi, maka masyarakat akan semakin mudah untuk mencapai suatu tujuan hidupnya. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran yaitu sebagai berikut:

a. Sarana dan prasarana Pendidikan

Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Sarana dan prasarana Desa Way Harong

| Sarana dan Prasarana | Keterangan | Jumlah |
|----------------------------------|-------------------|---------------|
| Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Ada | 2 |
| Taman Kanak-kanak (TK) | Ada | 1 |
| Sekolah Dasar (SD) | Ada | 6 |
| Sekolah Menengah Pertama (SMP) | Ada | 1 |
| Sekolah Menengah Atas (SMA) | Tidak Ada | - |
| Pondok Pesantren | Ada | 1 |
| Madrasah | Ada | 4 |
| Jumlah | | 15 |

Sumber: Profil Desa Way Harong tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa wilayah Desa Way Harong yang sangat luas dan masyarakat yang ramai dibuktikan dengan banyaknya sarana dan prasarana pendidikan didalamnya. Hal ini seharusnya memudahkan masyarakat dalam memperkuat tali silaturahmi masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan di Desa Way Harong.

b. Sarana dan prasarana Peribadahan

Table 3.7 Sarana dan prasarana peribadahan Desa Way Harong

| Sarana dan Prasarana | Jumlah |
|-----------------------------|---------------|
| Masjid | 6 |
| Mushola | 8 |
| Pura | - |
| Wihara | - |
| Gereja | - |
| Jumlah | 14 |

Sumber: Profil Desa Way Harong tahun 2015

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Way Harong 100% memeluk agama Islam sehingga memudahkan

masyarakat melakukan proses tali silaturahmi antar suku di Desa Way Harong.

Sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan dilingkungan perumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai keputusan masyarakat. Di Desa Way Harong sarana peribadatan digunakan tidak hanya untuk peribadatan saja namun digunakan untuk musyawarah dan silaturahmi antar masyarakat dalam rencana pembangunan dalam rangka memudahkan masyarakat melakukan sesuatu, contoh musyawarah pembanguna jalan dan pengajian kajian Islami.

c. Sarana dan prasarana Kesehatan

Table 3.8 Sarana dan prasarana kesehatan Desa Way Harong

| Sarana dan Prasarana | Jumlah |
|-----------------------------|---------------|
| Posyandu | 5 |
| Poskesdes | - |
| Puskesmas | - |
| Puskesmas Pembantu | - |
| Rumah Sakit | - |
| Jumlah | 5 |

Sumber: Profil Desa Way Harong tahun 2015

Berdasarkan tabel tersebut diketahui sarana dan prasarana kesehatan yang terdapat di Desa Way Harong, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, hanya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang

berjumlah lima. Selanjutnya, juga terdapat *home care* dan ini termasuk program perawatan kesehatan masyarakat. Sarana kesehatan juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa way harong dikarenakan wilayah yang sangat luas dan masyarakat yang ramai, dalam hal ini peran kepala desa sangat dibutuhkan dalam menentukan kebijakan dibidang kesehatan dikarenakan semakin banyak jumlah masyarakat maka akan semakin banyak jumlah jenis penyakit sehingga dibutuhkan sarana kesehatan dari pemerintah guna membantu masyarakat dibidang kesehatan.

- d. Komposisi penduduk Desa Way Harong menurut ritual kebiasaan dari lahiran sampai kematian

**Tabel 3.9 Komposisi penduduk
Desa Way Harong menurut adat dan ritual kebiasaan**

| Ritual kebiasaan | Suku sunda | Suku jawa | Suku lampung |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| Syukuran Proses hamil 7 bulan | Nujuh bulan | Nujuh bulan atau mitoni | Kukhuk limau/ blengkeh |
| Pemberian nama bayi | 40 hari (ngaranan) | 5 hari (selametan sepasaran /brokohan) | Becokokh |
| Usia remaja | Sunat | Tetaki/khitan/ sunatan | Ngatak sanak ngaji / khitanan |
| perkawinan | Kawinan | Nikahan | Kahwin |
| Kematian | Yasinan 7,40,100,1000 hari, ngehol | Yasinan 3,7,40,100 hari | Yasinan 7,40,100,1000 hari, |

Sumber: wawancaratokoh adat desa wayharong

Dalam konteknya ritual kebiasaan dari masa kelahiran sampai kematian hampir sama dilakukan setiap suku didesa way harong

namun proses pelaksanaannya sangat jauh berbeda disebabkan oleh tradisi, kebiasaan dan sejarah dari sebuah ritual mereka anut, serta masih banyak ritual kebiasaan yang lainnya dengan keanekaragaman suku dan budaya yang ada di desa way harong.

B. Peran Kepala Desa dalam Upaya Mempersatukan Suku Bangsa dan Budaya di Desa Way Harong

1. Peran kepala desa

Setelah melakukan wawancara, maka dapat ditarik simpulan. Adapun simpulan terhadap wawancara tentang peran kepala desa yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menampung keluhan dan aspirasi masyarakat, dalam hal ini Kepala Desa sangat berperan dalam menampung segala keluhan permasalahan yang ada di desa baik keluhan yang sifatnya Individual atau kelompok. Kepala Desa menjadi instrument serta alat untuk menampung keluhan yang dialami masyarakat, dengan begitu pemerintah desa dapat mengetahui letak permasalahan atau kekurangan dan memiliki tujuan yang diupayakan untuk mengubah keadaan tersebut.
- b. Melindungi serta menjaga nama baik Desa Way Harong di mata masyarakat desa maupun masyarakat luar desa. Hal ini adalah salah satu tugas dan tanggung jawab selaku pemimpin di desa, agar tercipta keadaan aman damai dan tertib, serta memajukan perekonomian yang ada didalamnya.

- c. Memimpin musyawarah dalam masyarakat, Kepala Desa sebagai pemimpin di desa sangat berperan dalam membangun kegiatan diskusi maupun musyawarah sebagai penengah serta penampung aspirasi masyarakat desa. Musyawarah perlu di implementasikan secara rutin guna menjaga segala aspek yang telah terbangun, seperti contoh menjaga keharmonisan warga yang berbeda kesukuan.
- d. Melibatkan musyawarah dalam rencana pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan kebutuhan yang pokok dalam memberikan kemajuan yang signifikan dalam sebuah desa, maka hal tersebut sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam rencana pembangunan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera contohnya MUSDUS yang dilaksanakan sebelum kegiatan MUSDUS dilaksanakan di kediaman kepala dusun atau aula dusun dan MUSDES dilaksanakan setahun sekali yaitu dilakukan dimasa akhir tahun guna merancang kegiatan dan rencana pembangunan untuk diajukan tahun yang akan datang dilaksanakan di balai desa atau aula desa.
- e. Menyelesaikan permasalahan masyarakat desa bila terjadi perselisihan antar masyarakat. Hal ini merupakan tanggung jawab Kepala Desa beserta jajarannya atas perselisihan yang terjadi di lingkungan masyarakat desa ataupun masalah yang timbul karena konflik antara lembaga bekerja sama dengan aparat Bhabikamtibmas desa setempat. Agar kembali terjadi kerukunan Kepala Desa dituntut melakukan

tindakan perdamaian atau mediasi dan menjadi mediator terhadap pihak-pihak yang berselisih. Hal ini kepala desa melakukan silaturahmi rutin dengan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan agenda kegiatan seperti diskusi dan acara ulang tahun desa guna mencegah perselisihan yang terjadi di desa Way Harong.

- f. Menghormati adat istiadat atau kebiasaan, dilakukan tidak hanya kepala desa melainkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, namun Kepala Desa lebih berperan aktif dalam memelihara perbedaan yang ada dalam masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan anggaran yang lebih untuk pemberdayaan seni dan kebudayaan yang ada di Desa Way Harong.
2. Pendekatan yang Dilakukan Kepala Desa dalam Mempersatukan Suku dan Budaya

Ketersinggungan antar suku tidak begitu mendapat perhitungan oleh pemeritahan desa, apalagi sampai pada berujung konflik yang mengarah pada konflik agama. Ketika sebuah perkelahian hanya terjadi sekali tidak berdampak pada citra buruk pemerintah maka kejadian itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak berbahaya. Namun ketika ketersinggungan antar suku terjadi berlarut-larut pemerintah desa akan mendapatkan citra yang buruk. Upaya Kepala Desa khususnya Desa Way Harong dalam mempersatukan suku yang bersitegang dibutuhkan pendekatan yang dapat diaplikasikan antaranya:

- a. Mengadakan acara silaturahmi rutin yang berkelanjutan sehingga mempererat tali persaudaraan di desa Way Harong sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakat, yaitu dilaksanakan pada saat malam hari dan waktu waktu luang.
- b. Mengajak masyarakat bergotong Royong bersama – sama dengan aparat pemerintah desa agar terjalin hubungan baik. Dilaksanakan rutin menjelang akhir bulan dan menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia agar tercipta rasa memiliki serta saling menjaga kebersihan lingkungan bersama. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pembauran pemerintahan terhadap masyarakat agar tidak terjadi kesenggangan diantaranya.
- c. Mengadakan kegiatan pengajian rutin sesuai kalender Panitia Hari Besar Islam PHBI di Desa Way Harong yang dilaksanakan bergilir kesetiap dusun, tujuannya adalah menghadirkan keharmonisan, mempererat tali silaturahmi khususnya warga yang berbeda kesukuannya, dan memberikan wawasan baru yang kedepannya diharapkan dapat di aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Memberi dukungan serta arahan kepada pemuda yang kreatif dan inovatif dalam bidang prestasi kesenian, olahraga, wirausaha dan sebagainya, guna memberi dukungan berupa moril dan materil sehingga memudahkan pemuda menggapai tujuannya, dalam hal ini yang dikelola organisasi desa yaitu Karang Taruna.

3. Faktor yang Menghambat dalam Mempersatukan Suku dan Budaya di Desa Way Harong

- a. Berbeda kebiasaan, bagi masyarakat umumnya yang menganggap bahwa adat merupakan hukum kedua yang dibenarkan dalam keseharian, banyak yang bisa dikaji lagi mengenai adat kehidupan sehari-hari, baik berupa aktifitas kecil maupun untuk kegiatan penting berupa hari besar agama, pernikahan, hari kelahiran, dan lainnya. Di Desa Way Harong bersikukuh dengan identitasnya, menolak bercampur dengan kebudayaan lain. Orang-orang di Desa Way Harong cenderung memandang orang lain secara tidak sadar dengan menggunakan kelompok kita sendiri sebagai kriteria untuk penilaian. Contoh dalam segi beribadah setiap suku di desa way harong memiliki cara dan kebiasaan ritual yang berbeda dan aturan tersendiri.
- b. Perbedaan Logat atau gaya bahasa, serta rendahnya tingkat pendidikan, perbedaan ini disebabkan karena perbedaan asal daerah dan perbedaan status sosial. Di Desa Way Harong contohnya cara orang Sunda berbeda dengan orang Lampung dalam mengungkapkan sesuatu dalam Bahasa Indonesia. Jawa dan sebagainya, keunikan itu pada akhirnya membentuk aksen, logat atau dialek. Yang pada akhirnya membatasi komunikasi dalam bersosialisasi antara suku satu dan lainnya. Serta kurang kesadaran akan pendidikan, disebabkan motifasi orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan tinggi itu mahal, selain hal

tersebut pengaruh lingkungan juga berpengaruh dalam menuntut pendidikan yang lebih tinggi.

- c. Biasanya pendatang lebih Giat dalam kegiatan ekonomi tetapi masyarakat heterogen, sosial ekonomi. Faktor ekonomi dapat mempengaruhi toleransi antar suku, karena di dalam desa Way Harong terdapat berbagai pejabat pemerintah dan pengusaha dalam suku yang berbeda. Jarang terjadi interaksi sosial ketika bertetangga, mereka umumnya mementingkan kelompok suku mereka untuk lebih intens dalam bersosialisasi atau sekedar meminta bantuan. Dalam hal ini disimpulkan bahwa pendatang sudah siap dengan skil keahlian yang dimiliki dalam setiap daerah yang akan mereka datangi dan membuka peluang untuk bertahan lebih lama atau menetap selamanya di daerah yang ditempatinya. Sehingga menyebabkan kesenjangan sosial diantara masyarakat di desa way harong.

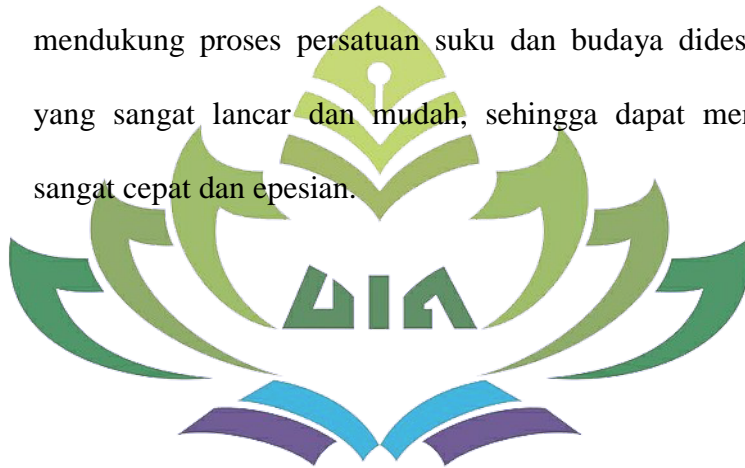
- d. Wilayah desa yang cukup luas dan masyarakat yang ramai, desa Way Harong terdapat 12 dusun dengan jumlah masyarakat sebesar 5830 orang, sehingga keterbatasan Kepala desa dalam menjangkau setiap desa guna memberikan edukasi terkait rasa toleransi. Atau menghimbau mereka untuk ikut bergabung dalam acara yang telah diagendakan oleh kepala desa, mereka yang jauh dari pusat pemerintahan desa umumnya enggan untuk berpartisipasi. Sehingga ini menjadi salah satu faktor penghambat kepala desa dalam mempersatukan keanekaragaman suku dan budaya di desa way harong.

- e. Kepentingan politik dan sikap fanatik terhadap sukunya sendiri, faktor berikutnya yang tidak kalah mempengaruhi adalah kepentingan politik, apalagi ini merupakan tahun politik, yang mana akan diselenggarakan pemilihan calon legislatif dan calon presiden serta wakilnya di seluruh Indonesia, dan Desa Way Harong khususnya. Mereka yang berbeda pandangan politik akan semakin bersitegang karena belum terciptanya toleransi antar suku yang tinggi. Di samping itu pejabat daerah dari suku tertentu yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif akan sulit mendapatkan suara mereka yang berbeda suku. Umumnya antar suku di desa Way Harong lebih loyal terhadap sukunya atau kelompok tertentu, sehingga suku mayoritas yang berpotensi mendapatkan suara yang lebih besar.

4. Faktor yang mendukung dalam Mempersatukan Suku dan Budaya di Desa Way Harong

- a. Kepala desa melaksanakan tugas sesuai pedoman dalam undang undang dan peraturan daerah yang telah mengatur tentang pemerintahan desa sudah lengkap dan terperinci, dalam hal ini kepala desa Way harong selalu berpedoman dengan Undang undang dan Peraturan Daerah dalam setiap pelaksanaan dan perencanaan pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. peraturan daerah yang mengatur tentang pemerintahan desa sudah lengkap dan terperinci

- b. Anggaran dana desa setiap tahunnya yang besar sehingga memudahkan kepala desa melaksanakan pembangunan dan pembinaan terhadap masyarakat dibidang pelestarian budaya dan peningkatan sumber daya manusia.
- c. Masyarakat desa Way Harong yang sadar persatuan dan kesatuan sehingga memudahkan proses persatuan suku dan budaya didesa way harong berjalan dengan baik.
- d. Perkembangan jaman serta teknologi komunikasi canggih yang mendukung proses persatuan suku dan budaya didesa Way Harong yang sangat lancar dan mudah, sehingga dapat membantu dengan sangat cepat dan efisien.



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN KEPALA DESA DALAM MEMPERSATUKAN KERAGAMAN SUKU DAN BUDAYA DI DESA WAY HARONG

A. Peran Kepala Desa dalam Mempersatukan Keanekaragaman Suku Budaya di Desa Way Harong Menurut UU

berdasarkan hasil penelitian tentang Peran kepala Desa dalam mempersatukan suku khususnya di Desa Way Harong terdapat dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2014 pasal 4 dan pasal 18 antara lain :

1. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Dalam hal ini peran kepala Desa Wayharong telah melakukan beberapa pendekatan guna melestarikan tradisi, adat dan budaya dengan cara mengadakan kegiatan pengajian rutin sesuai kalender Panitia Hari Besar Islam PHBI desa way harong yang dilaksanakan bergilir kesetiap dusun, tujuannya adalah menghadirkan keharmonisan, mempererat tali silaturahmi khususnya warga yang berbeda kesukuannya, dan memberikan wawasan baru yang kedepannya diharapkan dapat di aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatkan ketahanan sosial budaya, masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasiona, dalam hal ini kepala desa wayharong melakukan kegiatan dengan cara Mengadakan acara silaturahmi rutin yang berkelanjutan sehingga mempererat tali

persaudaraan di desa Way Harong sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakat, yaitu dilaksanakan pada saat malam hari dan waktu waktu luang. Mengajak Gotong Royong bersama – sama dengan masyarakat agar terjalin hubungan baik. Dilaksanakan menjelang akhir bulan dan menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia agar tercipta rasa memiliki serta saling menjaga kebersihan lingkungan.

3. Dalam pasal 18 kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat desa. Seperti hal nya yang dilakukan oleh kepala desa wayharong dalam hal ini memberi dukungan serta arahan kepada pemuda yang kreative dan inovatif dalam bidang prestasi kesenian, olahraga, wirausaha dan sebagainya, guna memberi dukungan berupa moril dan materil sehingga memudahkan pemuda menggapai tujuannya, dalam hal ini yang dikelola organisasi desa yaitu Karang Taruna.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Kepala Desa Mempersatukan Keanekaragaman Suku dan Budaya di Desa Way Harong.

Kepala desa mempunyai andil dan tanggung jawab yang besar terhadap apa yang terjadi di desanya. Dalam Undang-undang positif terdapat banyak kewenangan yang dimiliki kepala desa, seperti apa yang telah disampaikan di sub bab sebelumnya, dan kali ini bagaimana seharusnya peran kepala desa dalam kaca mata Islam.

Kepala desa adalah sebuah pemimpin didalam desa yang mengatur dan menentukan kebijakan kebijakan dalam sebuah peraturan dalam desa. Dalam islam istilah kepala desa ialah pemimpin atau dikenal sebagai imamah. Kedudukan seorang pemimpin dalam islam sangatlah penting. Bahkan keberadannya pardu kifayah dimana setiap manusai akan berdosa apabila tidak adanya seorang pemipin pun dan dibebankan hukum tersebut terbebas manakala salah seorang dari umat telah terpilih menjadi pemimpin.

Hukum islam ialah doktrin yang bersangkutan dengan perbuatan orang orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (takrir). Termasuk perbuatan tatacara dan tuntunan menjadi seorang pemimpin telah diatur dalam hukum islam, keberadaan seorang pemimpin yang diakui oleh syariat menunjukan seorang pemimpin harus mengerti

akan agamanya, ilmu yang membahas tentang pemeritahan dalam islam dikenal dengan fiqh siyasah.

Peran kepala desa jika dilihat dari kacamata Islam, mempunyai peran sebagai *ulil umri*. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Sementara itu peran kepala desa khususnya desa Way Harong dalam memimpin suatu wilayah termasuk dalam objek kajian *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* merupakan hubungan antara pemimpin di satu tempat atau wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu biasanya dibatasi hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan ralisasi kemasyarakatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Terdapat hak rakyat diantaranya hak persamaan, hak diberlakukan secara adil, hak kebebasan berfikir, beraqidah, berpendapat, berbicara, berpendidikan dan memiliki tempat tinggal. Dalam hal ini kepala desa wayharong telah memberikan kebebasan hak setiap individu maupun kelompok dusun yang ada di desa wayharong, baik itu kebebasan tradisi, adat maupun budaya, selama masih bernilai positif.

Setelah peneliti melakukan wawancara langsung serta menganalisa terhadap kepala desa dan perangkat pemerintah desa lainnya khususnya desa Way Harong dapat disimpulkan bahwa. Interseksi yang terjadi di Desa Way Harong perlu adanya integrasi sosial dalam penanganannya, sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Maka yang dapat dilakukan oleh Kepala Desa serta perangkat desa lainnya dalam menciptakan kesatuan antar suku diantaranya adalah:

- a. Mengadakan acara silaturahmi rutin yang berkelanjutan sehingga mempererat tali persaudaraan di desa Way Harong sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakat, yaitu dilaksanakan pada saat malam hari dan waktu waktu luang.

Sebagai umat beragama, menjalin tali silaturahmi antar sesama manusia sangat penting untuk dijalankan. Pasalnya selain menjalankan ibadah seperti sholat puasa dan zakat. Menjalini tali silaturahmi juga menjadi salah satu bentuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Hal ini dapat mendekatkan emosional antara masyarakat dan pemimpin serta sebagai metode pengumpulan aspirasi secara langsung.

- b. Mengajak Gotong Royong bersama – sama dengan masyarakat agar terjalin hubungan baik. Dilaksanakan menjelang akhir bulan dan menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia agar tercipta rasa

memiliki serta saling menjaga kebersihan lingkungan. Manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Saling melengkapi dan hidup penuh dalam nuansa kebersamaan. Karena manusia makhluk sosial, maka dibutuhkan rasabkerja sama tenggang rasa dan saling toleransi juga bahu membahu satu dengan lainnya untuk mencapai hidup didunia dan akhirat.

- c. Mengadakan kegiatan pengajian rutin sesuai kalender Panitia Hari Besar Islam PHBI desa way harong yang dilaksanakan bergilir kesetiap dusun, tujuannya adalah menghadirkan keharmonisan, mempererat tali silaturahmi khususnya warga yang berbeda kesukuannya, dan memberikan wawasan baru yang kedepannya diharapkan dapat di aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Didalam kegiatan pengajian terdapat manfaat yang begitu besar positifnya, didalam pengajian manfaat yang dapat diambil ialah memperbaiki diri yang awalnya berbuat negatip dengan merubah menjadi positif, serta menmbah ilmu pengetahuan dibidang umum atau keagamaan. Hal ini sesuai dengan tujuan pemimpin mencegah perbuatan yang kurang terpuji dikalangan masyarakat serta mengurangi kegiatan kegiatan yang kurang bermanfaat.
- d. Memberi dukungan serta arahan kepada pemuda yang kreative dan inovatif dalam bidang prestasi kesenian, olahraga, wirausaha dan sebagainya, guna memberi dukungan berupa moril dan materil sehingga memudahkan pemuda menggapai tujuannya, dalam hal ini

yang dikelola organisasi desa yaitu Karang Taruna. Hal ini sebagai tonggak penerus estapet kepemimpinan dalam sebuah pemerintahan masa depan.

Suatu upaya yang telah dilakukan oleh kepala desa Way Harong dalam mempersatukan sukunya yang beragam pasti akan melalui tantangan dan hambatan.

1. Proses tersebut akan melalui berbagai hambatan atau tantangan diantaranya adalah,

- a. Wilayah yang luas dan Masyarakat yang ramai

Desa Way Harong terdiri dari dua belas (12) dusun dengan jumlah masyarakat 5830 jiwa dengan jumlah wilayah luas 1035 Ha, hal ini menjadi tantangan kepala desa dalam menjangkau keseluruhan masyarakat di desa, sehingga menjadi tantangan kepala desa dalam menghadapi masyarakat yang banyak dan majemuk. Dengan banyaknya masyarakat maka akan banyak masalah yang timbul dalam sebuah masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan hambatan kepala desa dalam memecahkan suatu masalah dalam desa. Serta keinginan setiap masyarakat berbeda beda dalam segi pembangunan maupun kebutuhan lainnya sehingga menyebabkan kecemburuan dan konflik dalam masyarakat.

- b. Rendahnya tingkat pendidikan

Dalam desa Way Harong masih kurang kesadaran akan pendidikan, disebabkan motifasi orang tua yang beranggapan

bahwa pendidikan tinggi itu mahal, selain hal tersebut pengaruh lingkungan juga berpengaruh dalam menuntut pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh keadaan ekonomi masyarakat yang kurang tercukupi sehingga membatasi anak untuk sekolah. Maka dari itu peran kepala desa juga sangat berperan dalam memajukan serta menyadarkan akan pentingnya pendidikan guna memudahkan adaptasi hidup di masyarakat khususnya di Desa Way Harong

c. Sikap fanatik terhadap sukunya sendiri

Di desa way harong sikap fanatisme masih begitu kelihatan terutama bagi suku suku yang ada di desa way harong. Solidaritas menjadi amat terbatas terjadi hanya pada kelompok sukunya saja, hal ini menjadi hambatan kepala desa dalam mempersatukan keaneka ragaman suku dan budaya di desa.

Sikap fanatik masyarakat desa way harong diantaranya adalah larangan menikah dengan suku lain, sehingga menyebabkan munculnya sikap fanatisme tersebut. Hal ini tidak dibenarkan dalam Hukum Islam, UU dan aturan adat. Namun disebabkan karena kejadian atau tragedi yang terjadi sebelumnya sehingga masyarakat suku dapat menyimpulkan larangan tersebut, Kemudian menjadikan suku itu menjadi bahan ejekan kepada mereka yang

berbeda sukunya. Selain dari pada itu masyarakat di desa Way Harong enggan menggunakan bahasa Nasional bahasa Indonesia.

- d. Kepala desa yang kurang memahami bahasa suku di dalam masyarakat Desa Way Harong.

Kepala desa Way Harong saat ini bersuku lampung pesisir oleh karena itu kepala desa Way Harong kurang memahami, bahasa suku yang ada di desa Way Harong. Hal ini disebabkan masyarakat yang lebih mengutamakan bahasa suku dibandingkan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.

- e. Anggaran dana di desa Way Harong yang kurang tepat sasaran. Anggaran dana lebih diutamakan untuk pembangunan infrastruktur, namun untuk pembinaan masyarakat kurang diperhatikan, sehingga kurangnya sumber daya masyarakat di desa Way Harong. Hal ini menyebabkan sumber daya manusia di desa way harong kurang berkualitas dibidang kepemimpinan wira usaha dan sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran kepala desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran ditinjau dari UU No. 6 tahun 2014 yaitu sudah sesuai dengan UU tetapi dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan yaitu, perbedaan gaya bahasa, perbedaan kebiasaan, pendatang yang lebih giat dibandingkan masyarakat pribumi, wilayah desa yang cukup luas, masyarakat yang fanatik, serta kepentingan politik.
2. Pandangan hukum Islam terhadap peran Kepala desa di desa Way Harong dalam mempersatukan suku dan budaya di desa Way Harong juga sudah berperan sesuai dengan hukum Islam, dalam islam kepala desa sama saja seperti pemimpin atau yang disebut *ulil amri* yaitu orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan dan tugas, tetapi pada pelaksanaannya Kepala Desa Way Harong terdapat beberapa hambatan, yaitu perbedaan kebiasaan dalam ritual beribadah dan kepentingan politik. Kedudukan seorang pemimpin dalam islam sangatlah penting. Bahkan keberadannya Pardu Kifayah dimana setiap manusai akan berdosa apabila tidak adanya seorang pemipin pun dan dibebankan hukum tersebut terbebas manakala salah seorang dari umat telah terpilih menjadi pemimpin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti akan menyampaikan sedikit saran, yakni sebagai berikut:

1. Peneliti mengharapkan hasil penelitian berupa tinjauan hukum islam terhadap peran kepala desa dalam mempersatukan keaneka ragaman suku, dan budaya menurut UU No.6 tahun 2014 bermanfaat bagi masyarakat desa Way Harong dan hasil penelitian ini dapat diajdikan sebagai sumbangan ilmu di Fakultas Syari'ah pada umumnya serta Universitas Islam Raden Intan Lampung pada khususnya.
2. Kepala desa diharapkan dapat mengatasi faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan perannya di desa Way Harong. Terutama dibidang pengalokasian anggaran dana desa untuk sumber daya manusia, guna meningkatkan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di dalam desa maupun diluar desa

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- A. Ubaedillah Dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga Negaraan*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003)
- A. Syafi'i, Ma'arif. *Islam dan Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Tigaserangkai, 1988)
- Adisa Smita, Rahardjo. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006)
- Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996),
- Astuti Rahmani Newstormdan, *The Secret of Civil Society*, (Jakarta: Gramedia, 2000)
- Azra, Azyumardi. *Islam Substantif Agar Umat Tidak jadi Buih*, (Bandung: Mizan, 2000)
- Azyumardi, *Islam Substantif*, (Bandung: Tigaserangkai, 2000)
- Buchori Asyik Dan Trisnainingsih *Provisi Lampung Dari Daerah Penerima Menjadi Potensi Daerah Pengirim Transmigran* (Histokokultura, Jogjakarata, 2015)
- Budiman, Arief. *Budaya Masyarakat*, (Jakarta Timur: PT Intan, 2011)
- Budiyanto. *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006),
- Djamanat, Samosir. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2013)
- Hariyono. *Etnosentrisme*, (Yogyakarta: Graha Pena, 1993)
- Hashem, M. *Kekaguman Dunia Terhadap Islam*, (Bandung: Pustaka, 1983)
- Hidayah, Zulyani. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, *Hukum- Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2007),

J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers)

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005),

Kantini Kantono, *Pengantar Metodologi Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1996).

Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2002)

Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi*, (Jakarta: UI Press, 1987)

Lexi J. Meleong, *Meode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994),

M.Hashem, *Kekaguman Dunia Terhadap Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

Muhamad Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern* (Pustaka AMANI :Jakarta 2013)

Ronny Hartono Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta : Ghaila, 1994),

Rudi, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandar Lampung: PKPPUU FH UNILA, 2003),

Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011),

Shimp, Terence. Sharma, Shubhash. *Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the Cetscale*. Journal of Marketing Research.

Stoddard, L. *Dunia Baru Islam*. (Jakarta: Gunung Agung, 1964)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatankuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, (Alfabeta, Bandung, 2012),

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta Revisi, 1996), h.104

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Aditama, 2006)

- Suryaningrat, Bayu. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Lip 1979)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), h. 80
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997),
- Syafiie, InuKencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982)
- Syamsudin dkk. *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998)
- Syarbaini, Syahrial. *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)
- Taufiq al-Syawi, *Syuro Bukan Demokrasi*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997),
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, *Peraturan Lengkap Desa*, Sinar Grafika
- Wagio, Yudi. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1991)
- Wardi Bachtiar, *Metodelogi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997),
- Yafie, Ali. *Agama dan Pluralitas Bangsa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1991)
- Yatim, Badri. *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)

B. Peraturan Perundang Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Anotasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pattiro

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Desa*, Tatanusa

C. Referensi selain buku:

<https://rumasyho.com/17257-faedah-sirah-nabi-peletakan-hajar-aswad.html> Diakses pada 29 November 2018 pukul 19.30 WIB,

<https://laras.web.unej.ac.id/2015/05/04/etnosentrisme/> diakses pada tanggal 17 Desember 2018, pukul 22.10 WIB

<http://Kbbi.web.id>, akses pada tanggal 4 april 2017 Pukul 10.20 WIB

Muhamad Rusfi” Validasi Masalah Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum “ Jurnal Al Adalah Vol XXI No. 1, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung <http://www.Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Adalah.Html>, diakses pada tanggal 6 Desember 2018 21.15 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_bahasa_di_Indonesia diakses pada tanggal 18 Desember 2018, pukul 09.22

<https://www.brilio.net/life/ini-29-kata-di-Indonesia-yang-sama-pengucapan-tapi-ternyata-beda-arti-150320g.html> diakses pada tanggal 18 Desember 2018, pukul 09.42

